

**STRATEGI DPMD KABUPATEN GRESIK DALAM PROGRAM DESA BERDAYA
UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT DESA**

Nawal Nazala Firdausi¹, Indira Arundinasari²

Email: 23041010010@student.upnjatim.ac.id¹, indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Program Desa Berdaya merupakan salah satu inisiatif penting dari Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk meningkatkan kemampuan desa dan mendukung kemandirian ekonomi warganya. Program ini menitikberatkan pada penguatan lembaga desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan keterampilan sumber daya manusia di desa, serta memaksimalkan potensi ekonomi setempat. Penelitian magang ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis strategi yang diterapkan DPMD Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya dengan memanfaatkan teori manajemen strategis dari Fred R. David sebagai landasan analisis, terutama pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, pengamatan di lapangan, dan pengumpulan dokumen selama periode magang di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Ekonomi Desa. Hasil riset menunjukkan bahwa pendekatan DPMD dalam Program Desa Berdaya dimulai dengan merumuskan strategi berdasarkan analisis situasi desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM), potensi yang ada, serta masalah dalam pengelolaan kelembagaan. Pelaksanaan strategi dilakukan melalui kegiatan pendampingan bagi BUMDes, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dan masyarakat, bantuan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa, serta penguatan kerja sama antara berbagai pihak. Evaluasi strategi dilakukan lewat pemantauan rutin pendampingan, pengukuran capaian indikator keberdayaan desa, dan penyusunan saran untuk perbaikan program. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa strategi yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi peningkatan kapasitas desa, terutama dalam pengelolaan BUMDes dan pengembangan ekonomi lokal, meskipun tetap ada kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan variasi dalam tingkat kesiapan desa.

Kata Kunci: Program Desa Berdaya, Strategi, Pemberdayaan Masyarakat, Kemandirian Ekonomi.

Abstract: The Empowered Village Program is an important initiative of the Gresik Regency Government through the Community and Village Empowerment Service (DPMD) to improve village capacity and support the economic independence of its citizens. This program emphasizes strengthening village institutions, developing Village-Owned Enterprises (BUMDes), improving human resource skills in villages, and maximizing local economic potential. This internship research aims to describe and analyze the strategies implemented by the Gresik Regency DPMD in implementing the Empowered Village Program by utilizing Fred R. David's strategic management theory as a basis for analysis, especially in the planning, implementation, and evaluation stages of the strategy. The research method used is descriptive qualitative through observation, interviews, and document collection during the internship period in the field of Community and Village Institutional Empowerment. The research results show that the DPMD's approach in the Empowered Village Program begins with formulating a strategy based on an analysis of the village situation using Village Development Index (IDM) data, existing potential, and problems in institutional management. The strategy is implemented through mentoring activities for BUMDes, training to improve the capabilities of village officials and communities, assistance in preparing village planning documents, and strengthening cooperation between

various parties. Strategy evaluation was conducted through routine monitoring of mentoring, measuring the achievement of village empowerment indicators, and developing recommendations for program improvement. Field findings indicate that the implemented strategy contributed to increasing village capacity, particularly in managing village-owned enterprise (BUMDes) and developing local economies. Although challenges such as limited human resources, low community participation, and varying levels of village readiness persist.

Keywords: Empowered Village Program, Strategy, Community Empowerment, Economic Independence.

PENDAHULUAN

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 poin 8 (Republik, 2014). Pemerintah menekankan pentingnya kemandirian desa dengan memperkuat lembaga-lembaga desa, meningkatkan partisipasi warga, dan memanfaatkan sumber daya lokal. Desa kini tidak hanya dipandang sebagai objek dalam proses pembangunan, tetapi sebagai subjek yang dapat memicu pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan inisiatif mereka sendiri. Dalam kerangka ini, pemberdayaan masyarakat menjadi dasar penting untuk mendorong desa agar lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2025, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (BPK RI, 2025). Di Kabupaten Gresik, usaha untuk memberdayakan masyarakat dilaksanakan melalui Program Desa Berdaya, yaitu sebuah inisiatif yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan desa dalam bidang ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Desa Berdaya adalah sebuah inisiatif yang fokus pada pengembangan komunitas desa yang memenuhi syarat untuk menjadi desa yang mandiri dan mampu meningkatkan kapasitas warganya dengan cara menggali potensi dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia di desa (Pasuruan, 2025). Program Desa Berdaya diluncurkan dengan tujuan menumbuhkan icon icon desa mandiri yang ada di Jawa Timur (Timur, 2023) Serta program ini juga mendorong desa agar dapat mengoptimalkan potensi yang ada, mengembangkan usaha yang produktif, meningkatkan keikutsertaan masyarakat, dan memperkuat pengelolaan desa. Sasaran utama dari Program Desa Berdaya adalah mewujudkan kemandirian desa secara nyata, kreatif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa itu sendiri (Kemendagri, 2025).

Tabel: 1 Daerah Terkaya di Jawa Timur Berdasarkan PDRB Per Kapita Tahun 2025

No	Nama Kabupaten / Kota	PDRB Per Kapita
1.	Kota Kediri	PDRB per kapita sekitar Rp541 juta per tahun.
2.	Kota Surabaya	PDRB per kapita sekitar Rp245 juta per tahun.
3.	Kabupaten Gresik	PDRB per kapita sekitar Rp130 juta per tahun.
4.	Kabupaten Sidoarjo	PDRB per kapita sekitar Rp127 juta per tahun.
5.	Kabupaten Pasuruan	PDRB per kapita sekitar Rp113 juta per tahun.

Sumber: Netralnews 2025

Secara makro, pembangunan desa sangat berkaitan dengan keadaan ekonomi daerah yang terlihat dari nilai *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Kabupaten

Gresik adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup signifikan, meskipun Gresik dikenal sebagai salah satu pusat industri utama di Jawa Timur dan berada di posisi ketiga dalam PDRB per kapita dengan mencapai sekitar Rp130 juta setahun (Udo, 2025), keadaan ekonomi yang tinggi ini tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat desa secara adil. Ekonomi Gresik banyak didorong oleh sektor industri besar seperti semen, petrokimia, dan berbagai jenis manufaktur lainnya yang berlokasi di area perkotaan dan kawasan industri. Di sisi lain, beberapa masyarakat desa masih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil yang memberikan kontribusi lebih sedikit terhadap PDRB. Ketidakmerataan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan belum sepenuhnya memberikan dampak yang mendalam pada ekonomi di tingkat desa. Untuk itu, penguatan kemampuan institusi desa dan peningkatan swadaya ekonomi melalui inisiatif seperti Desa Berdaya merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2024 mengungkapkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki 290 desa dengan status mandiri dan 40 desa yang berstatus maju (Gresik, 2024). Walaupun pencapaian ini menunjukkan bahwa Gresik telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam pelayanan dasar, ketahanan sosial, dan ekonomi desa, status “mandiri” yang diraih di banyak kasus masih bersifat administratif. Ini berarti bahwa indikator yang dipenuhi belum sepenuhnya menggambarkan kemandirian ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. Di sejumlah desa, masih terdapat ketimpangan dalam kapasitas kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dalam pembangunan desa, pengelolaan pemerintahan desa, dan keterbatasan akses modal serta kemampuan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Khumair, 2025). Banyak pengelola BUMDes mengalami kesulitan dalam mengatur usaha, seperti menyusun rencana bisnis, mencatat transaksi keuangan, memasarkan produk, hingga menggunakan teknologi digital. Di samping itu, ketergantungan desa terhadap pendampingan atau pihak luar menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal belum sepenuhnya didorong oleh inisiatif dan kemampuan internal desa. Kelemahan ini semakin diperburuk oleh kurang maksimalnya penggunaan potensi lokal, baik dari bidang pertanian, kerajinan tangan, maupun wisata desa. Sebenarnya, potensi-potensi tersebut dapat menjadi sumber ekonomi baru jika dikelola dengan strategi yang sesuai dan berfokus pada kebutuhan desa. Keadaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara keberhasilan makro Kabupaten Gresik sebagai daerah industri utama dan kondisi ekonomi mikro desa yang masih membutuhkan dukungan lebih.

Melihat adanya perbedaan tersebut, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik menjadi sangat vital dalam menyusun rencana pendampingan dan pemberdayaan yang lebih menyeluruh. Melalui Program Desa Berdaya, DPMD berusaha mengarahkan desa untuk mengembangkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada potensi lokal, serta memperkuat kapasitas organisasi desa dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri.

Salah satu contoh nyata dari pelaksanaan Program Desa Berdaya di Kabupaten Gresik adalah perkembangan konsep One Village One Icon (OVOI), yaitu pendekatan yang mendorong masing-masing desa untuk memiliki ciri khas produk atau sektor unggulan sebagai identitas ekonominya. Cara ini membantu desa untuk lebih fokus dalam mengembangkan potensi tertentu agar dapat menghasilkan nilai tambah yang

berkesinambungan bagi masyarakat. Contohnya, pada Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang dengan icon cafe bamboo, Desa Srowo Kecamatan Sidayu dengan icon krupuk ikan serta mengolah limbah dengan alat sehingga menghasilkan pellet ikan, Desa Karangandong Kecamatan Driyorejo dengan icon sentra tanaman hias, dan Desa Panjuran Kecamatan Duduksampean dengan icon pengrajin Dobong. Melalui ide OVOI, desa tidak hanya mempunyai "produk unggulan", tetapi juga bertujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendukungnya.

Program Desa Berdaya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status administratif desa, tetapi juga mendorong perubahan nyata melalui penguatan BUMDes, peningkatan kemampuan sumber daya manusia desa, dan penciptaan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, Program Desa Berdaya diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat desa, sehingga menghasilkan desa yang mandiri, produktif, dan tahan banting dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya, keberhasilan tidak hanya dipengaruhi oleh besar anggaran atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara DPMD Kabupaten Gresik merancang dan mengimplementasikan manajemen strategis dengan baik. Untuk memahami cara kerja strategi tersebut, analisis ini menggunakan teori manajemen strategi yang dikembangkan oleh Fred R. David, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi (Munandar, 2014). Dari tahap perencanaan hingga evaluasi, setiap langkah harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan nyata desa. Berdasarkan situasi ini, penting untuk meneliti cara DPMD Kabupaten Gresik dalam memaksimalkan tujuan Program Desa Berdaya. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang seberapa efektif program dilaksanakan, tetapi juga menjadi saran strategis untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan desa di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang taktik DPMD Kabupaten Gresik dalam memaksimalkan sasaran Program Desa Berdaya. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada proses, kegiatan, dan dinamika pelaksanaan strategi pemberdayaan yang diamati secara langsung selama periode magang.

Penelitian dilakukan di area DPMD Kabupaten Gresik selama waktu magang yang ditentukan oleh lembaga. Informasi yang dikumpulkan dalam studi ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pelatihan dan pendampingan di desa, yang terlibat dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti panduan program, laporan aktivitas, Indeks Desa Membangun, dan peraturan yang berkaitan dengan pemberdayaan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Desa Berdaya di Kabupaten Gresik merupakan salah satu langkah penting dari pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan kemampuan lembaga, pengembangan usaha masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal. Hasil analisis mengenai pelaksanaan

Program Desa Berdaya di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa telah dilakukan dengan cara terencana melalui strategi yang dirancang oleh DPMD Untuk mengetahui posisi strategis dari program ini, sangat penting untuk melihat keadaan nyata desa-desa di Kabupaten Gresik. Berdasarkan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi tentang IDM yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa (PDTT, 2020). Secara empiris, data IDM tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki 290 desa/kelurahan memiliki status Mandiri dan 40 desa/kelurahan berstatus Maju, sehingga totalnya menjadi 330 desa/kelurahan (Gresik, 2024). Data ini memberikan informasi bahwa sebagian besar desa sudah mencapai tingkat keberdayaan yang baik, tetapi masih ada peluang untuk memperkuat, terutama bagi desa dengan status Maju agar dapat beralih menjadi Mandiri. Temuan ini menjadi dasar bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan ekonomi desa melalui Program Desa Berdaya perlu terus ditingkatkan serta program Desa Berdaya sangat penting sebagai alat strategis yang meningkatkan kapasitas desa dalam hal sosial, ekonomi nasional, dan kelembagaan untuk mendukung kemandirian jangka panjang.

DPMD Kabupaten Gresik melaksanakan Program Desa Berdaya dengan berbagai strategi yang fokus pada penguatan struktur organisasi desa, peningkatan keterampilan sumber daya manusia, pengembangan kegiatan ekonomi yang berlandaskan potensi lokal, serta dukungan BUMDes. Untuk memahami cara kerja strategi tersebut, analisis ini menggunakan teori manajemen strategi yang dikembangkan oleh Fred R. David, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi (Munandar, 2014).

Formulasi Strategi

Tahap dalam formulasi strategi mencakup penentuan visi dan misi, mengenali peluang serta tantangan yang dihadapi organisasi dari perspektif luar, menentukan kelemahan dan kekuatan yang ada dalam organisasi dari perspektif dalam, menyusun rencana untuk jangka panjang, membuat berbagai pilihan strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan diimplementasikan (sukanto, 2019). Tahap formulasi strategi adalah langkah awal yang sangat krusial dalam menentukan jalur dan keberhasilan Program Desa Berdaya di Kabupaten Gresik. Dalam tahap ini, DPMD merumuskan strategi berdasarkan analisis menyeluruh mengenai kondisi nyata di desa, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi untuk mendorong kemandirian desa. Proses perencanaan dilakukan dengan cara yang terencana melalui pengumpulan data, pemetaan potensi, identifikasi masalah, dan analisis situasi baik internal maupun eksternal. Proses perencanaan ini sejalan dengan fungsi utama dalam pembuatan strategi menurut teori pembangunan dan manajemen publik, yakni memberikan landasan pemikiran yang komprehensif sebelum implementasi kegiatan dilakukan di lapangan.

Langkah pertama dalam formulasi strategi adalah melakukan analisis kondisi desa secara luas dengan menggunakan data IDM Pada tahun 2024, Kabupaten Gresik memiliki 290 desa yang dianggap Mandiri dan 40 desa yang dianggap Maju (Gresik, 2024), menunjukkan bahwa secara administratif, wilayah ini terlihat telah berkembang dalam hal pembangunan desa. Namun, DPMD tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang lebih mendalam melalui identifikasi kapasitas lembaga desa, kinerja BUMDes kondisi ekonomi rakyat,

tingkat partisipasi masyarakat, dan kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi lokal. Hal ini sangat penting karena status mandiri yang terlihat dari angka tidak selalu mencerminkan kemandirian desa dalam mengembangkan usaha produktif atau mengelola aktivitas ekonomi berbasis masyarakat.

Selain itu, formulasi juga mengawasi keadaan ekonomi lokal, di mana Kabupaten Gresik memiliki PDRB per orang sekitar Rp130 juta setiap tahunnya dan menjadi salah satu pusat industri terkemuka di Jawa Timur. Meskipun kondisi ekonomi makro sangat kokoh, tidak semua desa merasakan manfaat dari perkembangan industri tersebut. Oleh karena itu, DPMD perlu memastikan bahwa rencana pemberdayaan yang dibuat dapat menjembatani kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Setelah melakukan pemetaan makro, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan serta potensi khusus di masing-masing desa. Di sini, DPMD melakukan penelitian lapangan bersama pendamping desa untuk mengidentifikasi peluang ekonomi lokal seperti pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) rumahan, kerajinan tangan, atau pariwisata desa. Serta hambatan yang bersifat internal seperti kekurangan sumber daya manusia, manajemen usaha yang kurang memadai, administrasi keuangan yang lemah, dan minimnya inovasi dalam usaha. Hasil analisis ini menjadi landasan dalam menentukan prioritas program, mengingat setiap desa memiliki karakteristik serta tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Desa yang memiliki potensi usaha yang sudah berjalan dengan baik memerlukan strategi untuk memperkuat bisnis, sementara desa dengan kelemahan dalam pengelolaannya membutuhkan pendekatan pelatihan dasar seperti administrasi, pengelolaan BUMDes, dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa.

Dalam fase perencanaan, DPMD juga menyesuaikan strategi program dengan kerangka peraturan, seperti UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Permendesa yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Penyesuaian dengan kerangka hukum ini sangat penting agar program memiliki dasar yang kuat dan dapat berintegrasi dengan pendanaan desa. Pada akhirnya, tahap perencanaan strategi menghasilkan sebuah rencana strategis yang terarah, mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang, prioritas program, sasaran intervensi, serta indikator capaian yang harus dipenuhi. Rencana tersebut tidak hanya menjadi pedoman bagi DPMD, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah desa dan pendamping desa dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Perencanaan yang berbasis data, analisis kebutuhan, dan penguatan kelembagaan inilah yang kemudian menjadi fondasi utama bagi keberhasilan Program Desa Berdaya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas pembangunan desa di Kabupaten Gresik.

Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah langkah di mana berbagai strategi dan kebijakan dikonversi menjadi tindakan nyata dengan cara menyusun program, anggaran, dan langkah-langkah procedural (Maswan, 2019). Tahap pelaksanaan strategi adalah bagian paling krusial dalam realisasi Program Desa Berdaya, karena saat inilah rencana strategis yang dirancang oleh DPMD Kabupaten Gresik benar-benar diubah menjadi kegiatan nyata di lapangan. Pelaksanaan strategi tidak hanya melibatkan pelaksanaan program teknis, tetapi juga tentang bagaimana organisasi menjalin komitmen, mengelola sumber daya, dan membangun koordinasi antar pihak untuk mencapai tujuan pemberdayaan desa secara efektif. Proses pelaksanaan ini menjadi

tolok ukur awal untuk mengetahui apakah strategi yang telah dirumuskan pada fase perencanaan dapat berjalan sesuai harapan atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Langkah awal dalam pelaksanaan adalah memperkuat struktur pelaksana program. DPMD menetapkan bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Desa sebagai koordinator utama, yang bekerja sama dengan pendamping desa, kecamatan, serta pemerintah desa untuk melaksanakan teknis di lapangan. Struktur pelaksana yang terdefinisi dengan baik sangat penting untuk menciptakan distribusi peran yang efisien, mengurangi tumpang tindih tugas, serta mempercepat proses koordinasi. Pendamping desa berfungsi sebagai penghubung antara DPMD dan pemerintah desa, sehingga setiap intervensi program bisa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing desa.

Selanjutnya, DPMD menyediakan berbagai sumber daya strategis untuk mendukung pelaksanaan program, seperti pendamping yang berpengalaman, modul pelatihan, bantuan teknis, fasilitas pemberdayaan, dan dukungan anggaran. Pendistribusian sumber daya ini menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan, mengingat masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia, administrasi, dan pemahaman teknis terkait pengembangan usaha desa. Sumber daya ini juga menjadi jalan untuk meningkatkan kapasitas desa, khususnya dalam pengelolaan BUMDes, administrasi keuangan, rencana pembangunan desa, dan pengelolaan potensi ekonomi lokal.

Implementasi strategi dilakukan melalui serangkaian kegiatan dukungan intensif dan pelatihan kemampuan. Dukungan ini diberikan secara teratur untuk membantu pemerintah desa dalam membuat berbagai dokumen penting seperti RKPDes, RPJMDes, SOP kelembagaan, dan laporan keuangan BUMDes. Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, pelatihan diberikan agar masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dalam kewirausahaan, literasi digital, pemasaran produk, inovasi usaha, manajemen keuangan, dan pengelolaan pariwisata desa. Kegiatan ini tidak hanya memperbaiki kemampuan teknis, tetapi juga membangun pola pikir kemandirian dan kerja sama di tingkat desa.

Selain pendampingan, penerapan strategi juga mencakup peningkatan ekonomi melalui pengembangan BUMDes dan unit usaha produktif lainnya. DPMD mendorong desa untuk mengembangkan bisnis yang berlandaskan potensi lokal, seperti agroindustri, pengolahan hasil pertanian, kerajinan, pariwisata desa, atau penyediaan layanan untuk masyarakat. Dalam pengamatan penulis, desa yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pengurus BUMDes menunjukkan pertumbuhan usaha yang lebih pesat, seperti peningkatan omzet, diversifikasi produk, atau perluasan pasar. Sebaliknya, desa yang masih bergantung pada dukungan eksternal menunjukkan perkembangan yang lebih lambat akibat kurangnya inisiatif dan kemampuan manajerial internal.

Dalam seluruh rangkaian penerapan, keterlibatan dan dukungan masyarakat menjadi elemen yang sangat krusial. Selama periode magang, penulis menemukan bahwa kesuksesan program sangat dipengaruhi oleh seberapa besar masyarakat terlibat dalam aktivitas, seperti pelatihan, diskusi desa, pengelolaan usaha, atau kegiatan ekonomi yang baru. Desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung lebih cepat mencapai kemandirian, sementara desa yang kurang aktif memerlukan pendampingan yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, fase implementasi strategi menunjukkan bahwa kesuksesan Program Desa Berdaya

dipengaruhi tidak hanya oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kapabilitas DPMD dalam memobilisasi seluruh sumber daya, menciptakan koordinasi, dan mendukung kolaborasi di berbagai tingkat desa. Pelaksanaan yang efektif menjadi fondasi yang kuat untuk keberhasilan proses evaluasi dan penyempurnaan program di masa depan.

Evaluasi Strategi

Tahap evaluasi strategi adalah langkah terakhir dalam siklus manajemen strategis yang bertujuan untuk menilai seberapa efektif strategi yang telah diimplementasikan dalam mencapai tujuan program (Indonesia, 2021). Dalam konteks Program Desa Berdaya di Kabupaten Gresik, evaluasi yang dilakukan oleh DPMD sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi pemberdayaan berjalan dengan baik, mengidentifikasi hasil yang diperoleh serta tantangan yang dihadapi, dan memberikan saran untuk perbaikan strategi di masa mendatang. Proses evaluasi ini lebih dari sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan suatu proses reflektif dan adaptif yang berperan dalam kelangsungan program.

Dalam implementasinya, DPMD melaksanakan evaluasi strategi melalui beberapa cara, salah satunya adalah dengan melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja desa dan BUMDes melalui pendamping lapangan. Pemantauan ini meliputi dokumentasi kegiatan, frekuensi pendampingan, kualitas laporan keuangan, penyusunan rencana desa, serta perkembangan usaha yang dikelola oleh BUMDes. Setiap pendamping harus menyampaikan laporan mengenai perkembangan desa secara berkala, termasuk pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Laporan ini menjadi acuan bagi DPMD untuk memahami sejauh mana strategi yang diterapkan telah berkontribusi terhadap penguatan kapasitas kelembagaan dan ekonomi desa.

Evaluasi juga dilakukan dengan mengukur indikator keberdayaan desa yang mengacu pada data IDM. IDM memberikan gambaran yang nyata tentang perubahan status desa dalam hal sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada tahun 2024, Gresik mencatat ada 290 desa yang berstatus Mandiri dan 40 desa yang berstatus Maju. Meskipun jumlah ini mencerminkan hasil yang positif, evaluasi DPMD menemukan bahwa sebagian dari kemandirian tersebut masih bersifat administratif, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang kualitas kemandirian desa. Perbandingan antara data awal dan data pasca intervensi program digunakan untuk menilai perkembangan nyata desa, seperti peningkatan pendapatan BUMDes, jumlah unit usaha yang baru, partisipasi warga dalam musyawarah desa, dan keberlangsungan kegiatan pelatihan.

Selain itu, penilaian strategi dilakukan dengan cara menganalisis secara langsung hasil program di lokasi, yang mencakup kunjungan ke desa yang dituju, diskusi kelompok terencana, dan wawancara dengan aparat desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat setempat. Dari penilaian di lapangan ini, ditemukan bahwa beberapa desa menunjukkan kemajuan yang signifikan, seperti dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan produk unggulan desa. Namun, beragam tantangan juga teridentifikasi, seperti kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha di kalangan beberapa pengurus BUMDes, ketidakstabilan administrasi desa akibat perubahan perangkat, rendahnya tingkat literasi digital, serta kecenderungan beberapa desa yang masih tergantung pada pendampingan.

Evaluasi strategi juga memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Dalam beberapa situasi, pelatihan yang dilakukan belum dapat menjangkau setiap desa secara merata akibat terbatasnya anggaran dan jumlah

tenaga pendamping. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian melakukan analisis untuk menentukan desa mana yang membutuhkan intervensi lebih mendalam dan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk meningkatkan keadilan dalam pendampingan. Evaluasi ini juga menilai bagaimana sumber daya yang diberikan seperti pelatihan, modul, atau bantuan teknis dilaksanakan oleh desa, apakah benar-benar digunakan untuk memperkuat kapasitas atau hanya menjadi dokumen administratif semata.

KESIMPULAN

Program Desa Berdaya yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Gresik telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan lembaga desa, memperkuat BUMDes, dan memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui serangkaian aktivitas yang terencana, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang dilakukan dengan sistematis, program ini dapat mengidentifikasi kebutuhan desa, memberikan pendampingan yang sesuai, serta memantau perkembangan program di lapangan. Namun, hasil selama magang juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti ketidakmerataan kualitas sumber daya manusia di desa, rendahnya pemahaman dalam pengelolaan usaha, dan perbedaan potensi antar desa yang menyebabkan hasil program tidak selalu konsisten. Oleh karena itu, kelangsungan program ini sangat bergantung pada peningkatan kemampuan pendamping, penguatan kerjasama antar sektor, serta strategi pembinaan yang lebih fleksibel agar tujuan utama menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dapat dicapai dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI. (2025). Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2025. ErmeSustainability (Switzerland). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Gresik, D. P. M. dan D. K. (2024). Indeks Desa Membangun 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik. <https://share.google/Zqz7WLw7pYtVnVyAV>
- Indonesia, U. I. (2021). Vismis, Tujuan. 9–36.
- Kemendagri. (2025). Desa Berdaya. Kemendagri. <https://share.google/hLpVgqI98rPSxcGln>
- Khumair, M. (2025). Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Gresik: Fokus pada Wilayah Selatan. Kompasiana. <https://share.google/ELJ8bIXeWwGNqjAOw>
- Maswan. (2019). Strategi Pelayanan Terhadap Nasabah di Pegadaian Syariah Unit Subrantas Panam Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1–64. <https://repository.uin-suska.ac.id/15867/>
- Munandar, H. (2014). Manajemen Strategis Berdasarkan Konsep Fred R. David. <https://share.google/xsk81nAKSfT6enkDF>
- Pasuruan, D. K. K. W. K. (2025). SOSIALISASI DESA PROGRAM DESA BERDAYA SPEDA MATIK TAHUN 2025 DESA KANDUNG. Desa Kandung Kecamatan Wingonan Kabupaten Pasuruan. <https://share.google/5mPfy2a0CG8C3kkk>
- PDTT, K. D. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019. Sereal Untuk, 51(1), 51.
- Republik, P. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2014. Jakarta: Bumi Aksara. 1.
- sukanto. (2019). Manajemen Strategi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 14–43.
- Timur, D. P. M. dan D. P. J. (2023). Launching Program Desa Berdaya Tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.
<https://share.google/hayaNaX5HVVeann5m>
- Udo, J. (2025). 5 Daerah Terkaya di Jawa Timur 2025, Mana Paling Makmur? Netral News.
<https://share.google/DgcbhiguukDmmmZ6k>.